

POLITIK ISLAM: TELAAH HISTORIS MONARCHISME MU'AWIYAH DAN KONFLIK YANG MENGITARINYA

Oleh : Muh. Ikhsan¹

Abstrak

Muawiyah bin Abu Sufyan adalah satu di antara ribuan sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling kontroversial. Muawiyah lahir dari kedua orangtua yang sebelumnya sangat memusuhi Islam, yaitu Abu Sufyan bin Harb dan Hindun binti Utbah. Sikapnya terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib, dianggap makar dan tergolong *bughat* (pemberontak). Tindakan Muawiyah mengangkat putranya Yazid sebagai khalifah, dituding telah menciptakan sistem *monarchy* (turun-temurun), sistem baru yang tak pernah ada sebelumnya.

Di sisi lain, jasa Muawiyah tak bisa dipungkiri. Pencatat wahyu ini tak hanya mampu mengakhiri konflik antar kaum Muslimin di masanya, tapi juga berhasil menancapkan pondasi sebuah dinasti yang telah memberikan begitu besar jasanya bagi dunia Islam: Dinasti Umayyah.

Maka, sosok Muawiyah pun mendapat banyak sorotan—pro dan kontra—dari berbagai kalangan. Di satu sisi, ada yang membencinya habis-habisan. Berbagai julukan ditabalkan. Ia disebut licik, culas, musang berbulu domba dan pengkhianat. Namun di lain sisi, ia dipuji dan disanjung oleh umat Islam karena Muawiyah memiliki kontribusi besar dalam perubahan struktur sosial dan politik umat pada waktu itu. Muawiyah memisahkan Qadhi dan Ulama, sehingga posisi qadhi atau hakim menjadi sebuah jabatan profesi. Beliau juga memodernisasi militer sehingga lebih profesional dalam menjalankan tugas, kendati sering digunakan untuk menghadapi lawan-lawan politiknya.

Kata Kunci: *politik Islam, monarchy, Mu'awiyah.*

Abstract

Muawiyah ibn Abu Sufyan was one among thousands of companions of the Prophet Muhammad SAW is the most controversial. Muawiyah was born of two parents who were previously very hostile to Islam, Abu Sufyan ibn Harb and Hind bint Utbah. Attitude towards the Caliph Ali ibn Abi Talib, is considered treason and classified bughat (rebels). Muawiyah action raised his son Yazid as caliph, has been accused of creating a system of monarchy (hereditary), a new system that was never there before. On the other hand, Muawiyah services can not be denied. Registrar revelation is not only able to end the conflict between the Muslims in his time, but also managed to build the foundation of a dynasty that has given so much for his contribution to the world of Islam: the Umayyad Dynasty. Thus, the figure of Muawiyah also received a lot of attention-pro and con-from all walks of life. On the one hand, there is all-out hate it. Various nicknames ditabalkan. He called cunning, deceitful, and treacherous weasel in sheep's clothing. But on the other hand, he praised and applauded by Muslims because Muawiyah had a major contribution in social structure and political change in the people at that time. Muawiyah separating Qadhi and scholars, so that the position of Qadi or judge to be a professional position. He also modernize the military so that more professional in carrying out the task, despite the often used against political opponents.

Key words: *political Islam, the monarchy, Mu'awiyah.*

¹ Dosen Jurusan Dakwah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari

A. Pendahuluan

Asas dari pembentukan khilafah atau dinasti Umayyah muncul sesaat setelah bersatunya umat Islam kembali yang pada waktu itu lebih populer dengan sebutan “tahun persatuan”. Di mana Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib turun dari jabatannya sebagai khalifah dan diserahkan kepada Muawiyah.

Mu'awiyah ibn Abi Sufyan (selanjutnya baca: Mu'awiyah) disebut-sebut sebagai pendiri dari dinasti Umayyah dan sekaligus sebagai khalifah pertamanya. Muawiyah telah masuk Islam sebelum ayahnya, Abi Sufyan yakni pada umrah *qadha'* dan menampakkan serta menyatakan keislamannya pada hari penaklukan kota Mekah. Muawiyah adalah orang yang berperawakan tinggi, berkulit putih, serta gagah dan berwibawa.²

Mu'awiyah dalam membangun pemerintahannya menjalankan sistem khalifah. Akan tetapi sistem khalifah pada masa dinasti Umayyah sangat jauh berbeda dengan pemerintahan masa *Khulafa' al-Rasyidun*, dimana sistem khalifah tidak lagi didasari asas musyawarah dan bai'at tetapi telah beralih ke pemerintahan *monarki*. Mulai dari Abu Bakar hingga kepada Ali bin Abi Thalib disebut dengan periode *khilafah rasyidah* dan para khalifahnya disebut *Khulafa' al-Rasyidun* (khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk). Ciri yang paling menonjol dari masa ini adalah bahwa khalifah benar-benar meneladani sikap dan perilaku nabi Muhammad saw. Namun, setelah masa ini pemerintahan Islam justru berbentuk kerajaan. Kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan para penguasa dinasti Umayyah—dalam memerintah—seringkali bertindak otoriter.³ Meskipun demikian, pemerintahan dinasti Umayyah sedikit banyaknya telah memberikan sumbangan yang terbesar untuk kemajuan peradaban Islam serta perluasan ekspansi kekuasaan Islam dengan berbagai macam penaklukan.

1. Awal Pembentukan Dinasti Umayyah

Setelah terbunuhnya khalifah Ali bin Abi Thalib maka kedudukannya digantikan dan dijabat oleh anaknya Hasan. Ia memegang kekhalifahan setelah kematian ayahnya, Ali

²Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Zahabiy, *Tarikh al-Islam wa Wafayat al-Masyahir wa al-A'lam ahdu Muawiyah ibn Abi Sufyan*, (Cet. II; Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1992 M/1413 H), h. 308.

³Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, (Cet. XIV; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 42.

bin Abi Thalib dengan pembaiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Kufah (satu kota yang ada di Iraq, bagian Barat dari sungai Eufrat) dan tinggal di sana selama – kurang lebih – enam bulan. Pada suatu hari datanglah Mu'awiyah bin Abi Sufyan kepada Hasan dengan melakukan perundingan. Dia berupaya agar Hasan menyerahkan kekuasaan khalifah kepadanya dengan syarat tidak seorang pun menuntut kepadanya dari kalangan orang-orang Madinah, Hijaz, dan Iraq.

Permasalahan yang terjadi pada masa ayahnya – Ali bin Abi Thalib – dengan menunaikan ataupun melepaskan segala hutang-hutangnya dan itu disanggupi oleh Mu'awiyah seperti yang diinginkan oleh Hasan dan karenanya ia pun membuat perjanjian damai. Maka tercapailah perdamaian di antara kedua belah pihak. Perjanjian inilah yang kemudian akhirnya dapat mempersatukan Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik, kepemimpinan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Di sisi lain, perjanjian itu juga menyebabkan Mu'awiyah menjadi penguasa yang absolut dalam sejarah pemerintahan Islam. Tahun 41 Hijriyah/661 M atau tahun persatuan yang dikenal dalam sejarah sebagai tahun Jama'ah (*'am jama'ah*).⁴ Karena itu pula, berakhirlah pemerintahan *khulafa' al-Rasyidin* dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam blantika sejarah politik Islam. Tak kurang dari seorang pemikir Islam seperti – As-Suyuthi – mengemukakan bahwa peristiwa itu merupakan wujud dari mu'jizat nabawiyyah dalam sebuah haditsnya: “Allah swt., akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai dari kalangan muslimin”. Sehingga turunlah Hasan dari jabatannya sebagai khalifah untuk meredam dan memadamkan pertikaian yang terjadi dalam pemerintahan Islam. Hasan bin Ali bin Abi Thalib r.a. turun sebagai khalifah pada tahun 41 H pada bulan Rabi'ul Awal dan ada pula yang mengatakan bulan Jumadil Awal. Hasan kemudian meninggalkan kota Kufah menuju Madinah dan tinggal di kota tersebut sampai ia meninggal karena diracuni oleh istrinya sendiri Ja'dah binti Asy'ast bin Qaish yang belakangan kemudian diperisteri oleh Yazid bin Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan wafat pada tahun 49 H atau pada 5 Rabi'ul Awal 50 H.⁵

Mu'awiyah bin Abi Sufyan (661-680 M) sebagai khalifah awal dalam pemerintahan Umayyah, yang berbentuk kerajaan. Kekuasaan telah diwariskan secara

⁴Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1989), h. 64.

⁵Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa wa al-Umara*, (Cet. I; t.tp., 1408 H/1988 M), h. 152-154.

turun-temurun, dan khalifah-khalifah setelahnya kerap kali bertindak otoriter. Mu'awiyah bin Abi Sufyan adalah salah seorang sahabat Rasulullah saw. yang menyatakan keislamannya pada umrah *qadha* akan tetapi dia menyembunyikan keislamannya dari ayahnya Sufyan bin Harb dan ibunya Hindun binti Utbah bin Rabi'ah hingga terjadinya hari penaklukan kota Mekkah (*fath al-Makkah*). Ayahnya adalah salah seorang dari pembesar dan tokoh Quraisy di zaman jahiliyah, pemimpin yang dihormati dan disegani, serta memiliki harta yang banyak. Mu'awiyah adalah satu di antara beberapa orang sahabat yang menjadi penulis wahyu. Ia pernah meminta kepada Rasulullah saw. supaya memperistri anak perempuannya yaitu Azzah binti Abi Sufyan, akan tetapi tidak terjadi. Ketika daerah Syam bisa ditaklukkan, maka oleh Umar ia dijadikan walinya (gubernur) sebagai perwakilan kota Damaskus setelah saudaranya Yazid bin Abi Sufyan. Kemudian pada masa pemerintahan Usman bin Affan kebijakan tersebut tetap diteruskan dan bahkan daerah kekuasaannya ditambah. Dia pula yang membangun *qubbah khadraa* di kota Damaskus dan menempatinya selama 40 tahun.

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, memberikan isyarat kepada Mu'awiyah dan pembesar-pembesar yang lainnya sebagai orang yang terlibat dalam pembunuhan khalifah Usman dan berpendapat Mu'awiyah mestinya diturunkan dari jabatannya. Meskipun Mu'awiyah telah dipecat sebagai Gubernur Syam, tetapi penduduk Syam tetap berpihak kepadanya dan bahkan menentang Ali. Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengatakan bahwa dia tidak akan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sampai diserahkannya orang-orang yang membunuh Usman. Mu'awiyah beranggapan bahwa Usman dibunuh dengan cara yang zhalim, sehingga terjadilah peristiwa Dumatil Jandal dan peristiwa Shiffin yang keputusannya beralih secara *tahkim* yang mana Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin Ash juga terlibat di dalamnya. Sementara Ali bin Abi Thalib masih terlibat perselisihan dengan beberapa sahabat dan pengikutnya, serta terbagi dan terpecahnya kelompok Islam hingga ia terbunuh oleh salah seorang Khawarij di kota Kufah yang bernama Abd al-Rahman bin Muljam. Kemudian penduduk Iraq membaiat Hasan bin Ali bin Abi Thalib r.a.⁶ Tetapi hampir di saat yang bersamaan penduduk Syam juga membaiat Mu'awiyah sebagai khalifah. Karena itu Hasan memegang dan memimpin

⁶Imad al-Din Abi al-Fida Ismail bin Umar Katsir al-Qursy Dimasyq, *Bidayah wa al-Nihayah*, Juz II, (Cet. I; Beirut: Dar al-Hijr, 1418/1998), h. 146-147.

pasukan Iraq sedangkan pasukan dari Syam dikomandoi oleh Mu'awiyah. Maka ketika dua pasukan itu berjumpa, diupayakanlah untuk diadakan perjanjian damai. Hasan akhirnya melepaskan jabatan khalifah dan menyerahkan kekuasaan kepada Mu'awiyah, dan sejak detik itu pula tongkat kekhalifahan berada di tangan Mu'awiyah yang kemudian dikenal sebagai tahun jamaah (persatuan). Sebetulnya, jauh sebelumnya masyarakat Syam telah membaiat Mu'awiyah sebagai khalifah yakni setelah tragedi arbitrase (*tahkim*) tahun 37 H., sementara pembaiatan secara umum dilakukan setelah perjanjian damai tahun 41 H. Mu'awiyah menyerahkan perwalian Syam kepada Fadhalah bin Ubaid, kemudian setelahnya kepada Abi Idris Khaulani. Pengawasan dipimpin Qais bin Hamzah, sementara Sarjun bin Manshur al-Rumi ditunjuk sebagai sekretaris sekaligus asistennya. Mu'awiyah adalah khalifah yang pertama kali mengangkat pengawal/penjaga dan menerapkan sistem pemerintahan *monarchiheriditis* (kerajaan turun-temurun). Yang mesti digaris bawahi adalah bahwa pada hakikatnya pembaiatan secara umum (*'am al-jama'ah*) tidak lebih dari pengakuan secara terpaksa terhadap realita dalam upaya menjaga kesatuan umat. Atau dengan kata lain masuknya unsur kekuasaan dan keterpaksaan menggantikan kesukarelaan total atau permusyawaratan. Terjadinya *gap* antara idealisme dan realitas—*das sein* dan *das sollen*—dan sistem kekhalifahan dari asas yang mendasarinya telah menyimpang ke arah sistem monarki.⁷ Berbagai opini pun kemudian muncul dari sejumlah kelompok Islam mengenai kekhalifahan Mu'awiyah. Kelompok Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah misalnya mengakui kekhalifahannya beberapa saat setelah tahun persatuan, meskipun memang lebih terkesan dan banyak didorong oleh tendensi pengakuan akan realita yang ada. Sebab menurut mereka, kekhalifahan Mu'awiyah belum berdiri atas dasar pembaiatan yang bebas dan umum. Pandangan yang berseberangan dengan kelompok ini datang dari kaum Syi'ah, bahwa mereka hanya mengakui kekhalifahan Ali dan anak keturunannya, serta berpandangan bahwa kelompok selain Syi'ah adalah perampas hak-hak mereka. Dan karena itu pula mereka tidak mengakui sama sekali kekhalifahan Mu'awiyah dan khalifah-khalifah berikutnya.⁸

⁷Muh. Dhiau al-Din Rais, *Al-Nazhariyah al-Siyasiyyah al-Islamiyah*, (Cet. VI; Kairo: Maktabah Dar al-Turats Arabi) diterjemahkan Abdul Hayyie el-Kattani dkk., *Teori Politik Islam*, (Cet. VI; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 140.

⁸*Ibid.*, h. 141.

2. Situasi Politik Pada Masa Mu'awiyah bin Abi Sufyan

Sebagai dikemukakan terdahulu bahwa kekhalifahan Mu'awiyah adalah awal kekuasaan Bani Umayyah, yang menerapkan *monarchiheriditis* (kerajaan turun-temurun) sebagai ganti dari pemerintahan demokratis. Berdasarkan data sejarah yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa kekhalifahan Mu'awiyah diperoleh dengan dan melalui diplomasi, kekerasan, tipu daya, dan tidak melalui pemilihan dengan suara terbanyak.

Pada mulanya Mu'awiyah secara khusus tidak menginginkan adanya perubahan sama sekali. Dia menghormati kekuatan-kekuatan yang ada, dengan tetap membatasi dirinya pada penyeimbangan secara bijaksana antara satu kekuatan dengan kekuatan lainnya. Dia juga sangat berhati-hati untuk memperlakukan kekuatan berbagai kelompok suku yang ada. Sebagai contoh, mereka yang mendukung 'Ali diperlakukannya dengan kebesaran yang tak terduga dan tanpa rasa malu, dan sebaliknya justru dia menerima dukungan mereka yang diperlukannya.⁹ Kesuksesan kepemimpinan secara turun temurun sesungguhnya dimulai ketika Mu'awiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya, Yazid. Dilihat dari bentuk pemerintahannya, sebenarnya Mu'awiyah bermaksud mencontoh *monarchi* di Persia dan Bizantium.¹⁰ Dalam buku-buku sejarah menyebutkan bahwa ide awal pewarisan kekhalifahan berasal dari Al-Mughirah ibn Syu'bah¹¹ yang kala itu menjabat sebagai gubernur Kufah di masa Mu'awiyah. Justru dialah yang memberi saran kepada Mu'awiyah untuk mengangkat anaknya Yazid untuk menjadi khalifah. Ketika itu Mu'awiyah juga sudah meminta pandangan Ziyad—gubernur Basrah pada waktu itu—mengenai hal itu. Dengan pertimbangan Ziyad, Mu'awiyah tidak tergesa-gesa dan bertindak gegabah dalam

⁹M.A. Shaban, *Sejarah Islam (600-750): Penafsiran Baru*, terj. Machnun Husein, (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), h. 115.

¹⁰Suatu perubahan besar—dari segi sistem pemerintahan—terjadi pada masa Mu'awiyah berkuasa. Sejak masa pemerintahan Rasulullah SAW hingga Ali bin Abu Thalib, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem *khilafah an-nubuwwah* (pemerintahan prophetik), dimana setiap khalifah berperan ganda dalam menggantikan posisi Rasul, dalam hal kepala negara dan pemuka Islam. Pada masa Dinasti Umayyah, Muawiyah dengan pengalaman hubungan luar negeri selama berpuluh-puluh tahun mencoba untuk mengeksikasikan sistem pemerintahan baru, yaitu sistem *al-Mulk* (kerajaan/imperium). Perubahan sistem tersebut dilakukan dengan cara meniru sistem yang berkembang pada pemerintahan Persia, Bizantium, dan Etiopia pada masa itu. Lihat misalnya dalam Philip K. Hitti, *History of the Arabs: From Earliest Times to the Present*, Tenth Edition, (New York: Palgrave Macmillan, 2002), h. 240.

¹¹Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Juz V, (Kairo: Rawa'i Turats Arabi, 1387/1967), h. 301.

mengambil keputusan tersebut. Tetapi setelah kematian Ziyad, keinginan untuk menjadikan anaknya sebagai putra mahkota sedemikian kuat dan bulat.¹²

Tak dapat disangkal bahwa Mu'awiyah dalam memimpin masih tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya "khalifah Allah" dalam pengertian "penguasa" yang diangkat oleh Allah.¹³ Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan ibu kota negara yang sebelumnya di Madinah dipindahkan ke Damaskus. Pemindahan ibukota dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman imperium baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah yang merupakan pusat agama dan politik kepada sebuah kota yang kosmopolitan. Dari kota inilah daulat Umayyah melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat, yaitu sebuah imperium Arab.¹⁴ Ekspansi yang berhasil dilakukan pada masa Mu'awiyah antara lain ke wilayah-wilayah: Tunisia, Khurasan sampai ke sungai Oxus, Afganistan sampai ke Kabul, serangan kemudian dilanjutkan hingga ke ibukota Bizantium (Konstantinopel). Ekspansi ke Timur kemudian dilanjutkan oleh khalifah Abd al-Malik. Dia mengirimkan tentara untuk menyeberangi sungai Oxus dan berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawariz, Ferghana dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balukhistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Malta.¹⁵ Dalam pengungkapan yang cukup baik, Marshall G.S. Hodgson mengatakan:

¹²Mu'awiyah mempunyai beberapa alasan mengenai pengangkatan Yazid, yaitu: *Pertama*, Yazid adalah satu-satunya orang yang bisa diterima orang-orang Siria, karena apabila dari keluarga lain akan membawa ke dalam keluarga dan marganya sesuatu yang mengganggu keseimbangan kekuatan-kekuatan rawan yang telah dikembangkan oleh Mu'awiyah. *Kedua*, faktor usia Mu'awiyah yang sudah tua mendesaknya untuk cepat memilih siapa penggantinya. *Ketiga*, Mu'awiyah khawatir akan terjadi fitnah sebagaimana fitnah petumpahan darah sejak kematian Khalifah Utsman. Lihat John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Jilid VI, 1998, h. 97-99.

¹³Mengenai term sistem pemerintahan masa *khilafah Rasyidah* dan masa *dinasti Umayyah* berikut perbedaan keduanya, lihat Abul A'la al-Maududi, *Al-Khilafah wa al-Mulk*, diterjemahkan Muhammad Al-Baqir dengan *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, (Cet. VII; Bandung: Mizan, 1998), h. 63-67; 112; 136; 199; dan 223.

¹⁴Philip K. Hitti, *op. cit.*, h. 242. G.E. von Grunebaum, *Classical Islam: A History 600-1258*, (First Edition; Illinois: Aldine Publishing Company, 1970), h. 70.

¹⁵Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Cet. V; Jakarta: UI Press, 1990), h. 58-61.

“Pemerintahan Mu’awiyah menyaksikan penaklukan kembali sebagian besar wilayah Khurasan, dan pemukimannya yang permanen dengan kota-kota garnisun; banyak negeri Iran timur lainnya secara sistematis ditundukkan, termasuk bagian lembah tengah Oxus. Sebagian besar Anatolia dijadikan kota garnisun untuk waktu yang singkat, keunggulan angkatan laut dipertahankan di kawasan Laut Tengah timur, dan Konstantinopel dikepung; tetapi hanya sedikit kemajuan permanen dicapai di teritori Bizantium kecuali penaklukan yang dilakukan terhadap dataran-dataran tinggi Armenia. Ke sebelah Barat dari Mesir, terjadi pendudukan pertama negeri-negeri Barbar timur di Maghrib hingga mencapai Algeria (Aljazair) sekarang. Ketika dipandang tepat waktunya bagi pemulih kekuasaan negara kekhalifahan, kekuatan penaklukan Islam diperbarui, namun kekuatan ekspansif tidak lagi melimpah seperti semula. Suatu keseimbangan politik baru membutuhkan waktu untuk berkembang di negeri-negeri yang tidak pernah ditaklukkan sebelumnya, dan karena itu penaklukan-penaklukan selanjutnya ditentukan oleh sumber-sumber daya kekaisaran utama yang mapan yang sedang kuat-kuatnya, dan juga oleh dorongan antusiasme-antusiasme massa yang kelihatannya hampir saja meluncurkan dirinya sendiri pada masa Umar dan Utsman.”¹⁶

Konsolidasi internal dilakukan sejak masa pemerintahan Muawiyah. Tujuannya adalah untuk memperkokoh barisan dalam rangka pertahanan dan keamanan dalam negeri, antisipasi atas setiap gerak an pemberontakan, dan untuk memperlancar program futuhat. Idealnya konsolidasi tersebut dijadikan sebagai prasarana menuju keberhasilan program-program dinasti. Ada lima diwan (lembaga) yang menopang suksesnya konsolidasi yang dilakukan, yakni: Diwan al-Jund (Urusan Kemiliteran/the Military Board), Diwan ar-Rasail (Urusan Administrasi dan Surat/the Board of Correspondence), Diwan al-Barid (Urusan Pos/the Board of Posts), Diwan al-Kharaj (Urusan Keuangan/the Board of Finance), dan Diwan al-Khatam (Urusan Dokumentasi/the Board of Signet).¹⁷

¹⁶Hodgson, Marshall G. S., *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, (Chicago: University of Chicago Press, 1974), h. 317-318.

¹⁷Ahmad Amin, *Yaum al-Islam*, diterjemahkan Abu Laila dan M. Tohir dengan *Islam dari Masa ke Masa*, (Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 1993), h. 99-100.

Pada kenyataannya, tidak jarang terjadi kalau konsolidasi tersebut dilakukan hanya sebatas antisipasi terhadap gerakan pemberontakan saja.

Instrumen tertinggi dalam pemerintahannya yang bercorak Arab adalah *Syura*, sebuah dewan (kansil) Sheikh-sheikh yang ditunjuk oleh khalifah atau oleh gubernur provinsi, dengan fungsi konsultatif dan eksekutif. *Wufud* atau delegasi suku-suku bergabung dengan kansil-kansil kesukuan ini, bersama-sama membentuk struktur yang longgar, berasaskan kebebasan yang seluas-luasnya dalam menyatakan persetujuan dan loyalitas anggota terhadap bangsa Arab. Mu'awiyah sendiri jarang memberi perintah, tetapi cakap dalam melaksanakan pemerintahannya melalui proses yang dapat diandalkan berdasarkan kepercayaan, dan melalui kemampuan serta pengaruh pribadinya. Terbukti, di provinsi-provinsi kekuasaannya kebijakannya kemudian dilaksanakan oleh gubernur-gubernur yang diangkat. Jasa-jasa dalam pembangunan di berbagai bidang banyak dilakukan pada masa pemerintahannya. Mu'awiyah mendirikan dinas pos, menertibkan angkatan bersenjata, mencetak mata uang, dan jabatan Qadhi (hakim) mulai berkembang menjadi profesi sendiri. Selain itu, jenis atau pola pemerintahan terdahulu mulai berubah sejak zaman Mu'awiyah. Menurut beberapa ahli sejarah, pola pemerintahan yang dipakai pada masa itu adalah Otokrasi. Walaupun telah berbentuk kerajaan, Mu'awiyah tetap membuktikan eksistensinya dengan terus membuat kemajuan-kemajuan.¹⁸

Dalam sejarah perkembangan Islam, Mu'awiyahlah orang yang pertama mendirikan suatu departemen pencatatan (*diwan al-khatam*). Di mana setiap peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah harus disalin di dalam suatu register, kemudian yang asli harus disegel dan dikirimkan ke alamat yang dituju. Sebelumnya, yang dikirimkan adalah perintah-perintah yang terbuka. Bahkan pernah terjadi khalifah memberikan 1000 *dirham* kepada seseorang dari perbendaharaan provinsi. Surat yang berisi perintah itu dicegat dijalan dan angkanya diubah dengan angka yang lebih tinggi.¹⁹

¹⁸Lewis, Bernard, *The Arabs in History*, diterjemahkan Said Jamhuri dengan "Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah: dari segi Geografi, Sosial, Budaya dan Peranan Islam", (Cet. II; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h. 58.

¹⁹Syed Mahmudunnasir, *Islam: It's concepts and History*, diterjemahkan oleh Adang Affandi dengan *Islam: Konsepsi dan Sejarahnya*, (Cet. IV; Bandung: PT. Rosdakarya, 1994), h. 205.

B. Analisis

Kebijakan Dinasti Umayyah dalam hal bentuk pemerintahan merupakan hal yang sangat tepat, sebab semakin luas wilayah kekuasaan, akan semakin sulit untuk memelihara dan memakmurkannya. Kebijakan sentralisasi adalah kebijakan yang sangat bijaksana, dan ini merupakan sisi baik dari pemerintahan Umayyah, akibat penetrasi budaya.

Kebijakan Dinasti Umayyah menjadikan imperium sebagai sistem pemerintahan negara ketika itu, terjadi bukan pada masa awal dan atau pertengahan pemerintahan Muawiyah, melainkan ketika beliau hendak lengser keprabon. kebijakan beliau mengangkat putra mahkota, Yazid bin Muawiyah, sebagai kandidat tunggal, dan kebijakan beliau menjadikan azas nepotisme sebagai dasar pengangkatan khalifah menunjukkan bahwa dinasti ini sudah merubah sistem pemerintahan yang telah dijalankan para khalifah terdahulu. Banyak pihak yang tidak sepakat atas kebijakan yang merugikan umat ini. Sebab demokrasi sudah berubah menjadi monarki. Pemberontakan yang dilakukan Abdullah bin Zubeir dan penyusunan kekuatan yang dilakukan oleh Husein bin Ali adalah bukti nyata ketidaksepakatan mereka atas kebijakan ini. Namun setiap langkah mereka selalu kandas sebab angkatan darat pihak dinasti ketika itu sangat kuat dan tidak terkalahkan.

Hal yang menarik lagi adalah peran Mughirah bin Syu'bah dalam proses pengangkatan Yazid sebagai khalifah pengganti Mu'awiyah. Dengan demikian, yang ditiru oleh Muawiyah dari Bizantium adalah penerapan garis-garis kepemimpinan sebagaimana yang ditegaskan oleh Syed Mahmudunnasir dan bukan sistem pemerintahan.

Selanjutnya, eksistensi politik dinasti tersebut menarik untuk didiskusikan, terutama kaitannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang dikembangkan oleh rasul dan khulafa' sebelumnya. Hal ini perlu dipermasalahkan sebab berkaitan erat dengan nilai-nilai politik Islami yang dituntut Alquran dan as-Sunnah.

Al-Maududi menjelaskan, ada beberapa perbedaan mendasar antara prinsip-prinsip pemerintahan Dinasti Umayyah dan prinsip-prinsip yang telah dibangun oleh rasul dan para khalifah sebelumnya, yaitu: pengangkatan khalifah, cara hidup khulafa', kondisi bait al-mal, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, kebebasan peradilan, konsep syura, fanatisme kesukuan, dan dari segi kekuasaan hukum.

Dari segi pengangkatan khalifah, diketahui bahwa jabatan khalifah yang dimiliki oleh khulafa' sebelumnya adalah berdasarkan suara rakyat. Tidak ada upaya-upaya yang

mereka lakukan untuk menjadi khalifah, dan bai'at bukanlah akibat adanya kekuasaan, melainkan cara melegitimasi jabatan. Sementara pada masa dinasti Umayyah, kandidat khalifah sangat berkeinginan untuk menjadi khalifah dengan cara apapun. Seperti halnya Muawiyah (I) yang sangat berambisi untuk menjadi khalifah kaum muslim, bahkan sejak wafatnya Usman bin Affan. Ambisinya semakin kuat, sebab ia telah mempunyai massa dan kekuasaan walaupun tidak berdasarkan persetujuan kaum muslimin. Karena ia telah menjadi khalifah secara *de facto*, maka tidak ada pilihan lain kecuali untuk membai'at beliau.

Dari segi cara hidup, diketahui bahwa khalifah-khalifah sebelumnya hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka dapat mengetahui segala permasalahan yang dihadapi rakyat. Sementara diketahui, para khalifah Dinasti Umayyah telah meninggalkan pola dan cara hidup Nabi Muhammad SAW dan khulafa' ar-rasyidun. Mereka menjaga jarak dengan masyarakat, dengan tinggal di istana yang dikelilingi oleh para pengawal.

Baitul mal yang selama masa pemerintahan sebelumnya difungsikan sebagai dana swadaya masyarakat yang difungsikan untuk kepentingan rakyat, pada masa Umayyah telah berubah fungsi. Kas negara adalah milik penguasa dan keluarganya. Rakyat hanya wajib untuk menyetor pajak tanpa mempunyai hak menanyakan penggunaannya.

Pada masa pemerintahan rasul dan sahabat yang empat, konsep amar ma'ruf nahi munkar merupakan senjata ampuh dalam mencegah para pemimpin agar tidak terjerumus dalam kesalahan dan penyimpangan, dan rakyat secara terang-terangan menyerukan kebenaran tanpa takut atau ragu-ragu. Kondisi ini berbeda ketika masa Dinasti Umayyah berkuasa. Perlakuan dan politik yang berlaku di kalangan pemerintahan ini sedikit demi sedikit mencabut keberanian umat Islam, dan mengubah mereka menjadi pencari keuntungan untuk kepentingan pribadi.

Pada masa Umayyah, peran serta khalifah dalam penetapan kebijakan kekuasaan kehakiman membuat masyarakat sulit dalam mencari keadilan, sebab kebijakan tersebut berkaitan erat dengan kebebasan para hakim. Pada masa Nabi Muhammad dan khalifah-khalifah sebelum kekuasaan Umayyah, para hakim diangkat berdasarkan keputusan mereka dan berada di bawah naungan kekhalifahan. Namun para hakim pada hakekatnya memiliki kebebasan dari segala ikatan dan tekanan.

Beberapa perubahan prinsip yang terjadi mengarahkan kita pada pertanyaan, apakah Mu'awiyah telah mengikuti prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang dijalankan Nabi SAW dan khalifah-khalifah sebelumnya.

Berdasarkan kondisi-kondisi objektif yang telah dieksposisikan, maka secara induktif, penulis berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan Mu'awiyah tidak sesuai prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Rasul SAW dan khulafa' ar-rasyidin. Dalam skala yang lebih besar lagi, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tuntunan Alquran dan as-Sunnah.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan :

1. Mu'awiyah bin Abi Sufyan adalah khalifah yang pertama kali meletakkan prinsip pewarisan/imperium (*al-Mulk*) dalam kekuasaan pemerintahan Islam yang berbeda dengan pemerintahan *khulafa al-rasyidun*. Dapat dikatakan bahwa kondisi pemerintahan pada masa Mu'awiyah cukup stabil, sementara pemerintahan khalifah-khalifah setelahnya banyak diwarnai pemberontakan, konfrontasi, perang saudara dan timbulnya fitnah.
2. Pada masa pemerintahan Mu'awiyah ada lima *diwan* (lembaga) yang menopang suksesnya konsolidasi yang dilakukan, yakni: *Diwan al-Jund* (Urusan Kemiliteran/the Military Board), *Diwan ar-Rasail* (Urusan Administrasi dan Surat/the Board of Correspondence), *Diwan al-Barid* (Urusan Pos/the Board of Posts), *Diwan al-Kharaj* (Urusan Keuangan/the Board of Finance), dan *Diwan al-Khatam* (Urusan Dokumentasi/the Board of Signet).
3. Pemerintahan Islam meskipun telah bercampur baur unsur kerajaan dengan sistem pewarisan, makna-makna substansi dan tujuan-tujuan serta hakikat kekhalifahan masih utuh. Walaupun terjadi perselisihan atau bahkan perpecahan dari masa ke masa, negara Islam dengan bentuk apapun masih terus berjalan. Hukum Islam secara universal masih dilaksanakan sehingga masih memiliki kehormatan dan kekuatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ahmad, *Yaum al-Islam*, diterjemahkan Abu Laila dan M. Tohir dengan *Islam dari Masa ke Masa*, Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 1993.
- Dimasyq, 'Imad al-Din Abi al-Fida Ismail bin Umar Katsir al-Qursy, *Bidayah wa al-Nihayah*, Juz II, Cet. I; Beirut: Dar al-Hijr, 1418/1998.
- Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Jilid VI, 1998.
- Grunebaum, G.E. von, *Classical Islam: A History 600-1258*, First Edition; Illinois: Aldine Publishing Company, 1970.
- Hasan, Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1989.
- Hitti, Philip K., *History of the Arabs: From Earliest Times to the Present*, Tenth Edition, New York: Palgrave Macmillan, 2002.
- Hodgson, Marshall G. S., *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, Chicago: University of Chicago Press, 1974.
- Lewis, Bernard, *The Arabs in History*, diterjemahkan Said Jamhuri dengan "Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah: dari segi Geografi, Sosial, Budaya dan Peranan Islam", Cet. II; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Mahmudunnasir, Syed, *Islam: It's concepts and History*, diterjemahkan oleh Adang Affandi dengan *Islam: Konsepsi dan Sejarahnya*, Cet. IV; Bandung: PT. Rosdakarya, 1994.
- al-Maududi, Abul A'la, *Al-Khilafah wa al-Mulk*, diterjemahkan Muhammad Al-Baqir dengan *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Cet. VII; Bandung: Mizan, 1998.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Cet. V; Jakarta: UI Press, 1990.
- Rais, Muh. Dhiaul-Din, *Al-Nazhariyah al-Siyasiyyah al-Islamiyah*, Cet. VI; Kairo: Maktabah Dar al-Turats Arabi, diterjemahkan Abdul Hayyie el-Kattani dkk., *Teori Politik Islam*, Cet. VI; Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Shaban, M.A., *Sejarah Islam (600-750): Penafsiran Baru*, terj. Machnun Husein, Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.

al-Suyuthi, Jalal al-Din, *Tarikh al-Khulafa wa al-Umara*, Cet. I; t.tp.,1408 H/1988 M.

al-Thabari, Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Tarikh al-Umaml wa al-Muluk*, Juz V, Kairo:
Rawa'i Turats Arabi, 1387/1967.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, Cet. XIV; Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2003.

al-Zahabiy, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman, *Tarikh al-Islam wa Wafayat al-
Masyahir wa al-A'lam ahdu Muawiyah ibn Abi Sufyan*, Cet. II; Beirut: Dar al-Kitab al-
Arabi, 1992 M/1413 H.